

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PERDAMAIAN DARI SEKOLAH: *Pendekatan Gerakan Sosial*

Zaenal Abidin, dan Muhammad Taufik Ismail

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: za219@ums.ac.id



ABSTRAK

Sepanjang manusia hidup, ia tidak akan lepas dari konflik. Konflik senantiasa ada dan menyertai manusia dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Agar konflik ini tetap positif dan jauh dari kekerasan, dibutuhkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan alat paling tepat guna mencegah kekerasan dan konflik. Namun dalam dunia modern, belum terumuskan bagaimana pendidikan perdamaian yang tepat, terutama dalam konteks Indonesia. Disamping itu, dalam usaha menjaga perdamaian dan pengembangan masyarakat, bisa mengembangkan fungsi lembaga pendidikan. Dengan demikian, agar pendidikan selalu relevan dengan perkembangan zaman dan berperan aktif dalam mewujudkan civil society dibutuhkan shifting education paradigms. Dari pendidikan yang bersifat pengembangan individu, diperlebar menjadi pengembangan sosial masyarakat. Dari lembaga pendidikan yang memproduksi intelektual, diperlebar menjadi lembaga yang aktif menjaga perdamaian.

Kata Kunci: *Konflik, Perdamaian, Pendidikan Perdamaian*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk konfliktis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Secara sederhana konflik bisa diartikan pertentangan yang ditandai dengan pergerakan dari beberapa

pihak sehingga terjadi persinggungan. Pertentangan itu sendiri bisa muncul dalam bentuk pertentangan ide maupun pertentangan fisik.¹ Konflik merupakan kenyataan sosial yang harus dihadapi setiap individu maupun masyarakat. Tidak ada satupun manusia maupun masyarakat yang tidak pernah berkonflik. Sebuah

¹Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2014), hlm 5.

konflik tidak timbul dari ruang hampa, ia hadir dilatari dari perbedaan, baik itu perbedaan individu, yang dibawa sejak ia lahir, berupa identitas pribadi, atau perbedaan kelompok yang dibangun dengan proses interaksi sosial, atau disebut identitas kelompok. Karena kita terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, profesi, kultur dan agama. Dengan demikian, kemajemukan adalah fenomena yang tidak bisa dihindari.²

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.³ Konflik merupakan proses sosial yang wajar dalam suatu masyarakat, ia akan senantiasa ada sepanjang ada latar yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan itu bisa berupa, identitas, agama, kepentingan, dan lainnya. Sepanjang ada perbedaan dalam masyarakat, potensi konflik akan senantiasa ada. Konflik tidak selamanya negatif, konflik sebagai dinamika masyarakat bisa memperkuat solidaritas grup. Hal ini didasari dari tiga argumen. *Pertama*, konflik akan memperkuat

kohesi dan kolektivitas dalam sebuah kelompok yang sedang berkonflik. *Kedua*, dengan adanya situasi konflik, akan lebih memungkinkan adanya asosiasi dan koalisi baru. Dan *ketiga*, terbangunnya keseimbangan kekuatan antar kelompok. Namun jika sebuah konflik tidak termanajemen, sehingga mengarah kepada polarisasi yang mendalam dan dekat dengan kekerasan, konflik bisa berakibat destruktif. Konflik bisa berdampak positif jika terpelihara, terkontrol dan dimanajemen dengan baik, namun bisa berdampak negatif jika konflik mendekati pada kekerasan.

Dengan demikian, usaha kita untuk menjauhkan konflik dari kekerasan sangat penting, agar konflik tidak mengarah kepada hal yang destruktif. Pendidikan adalah pencegah konflik dan kekerasan yang terbaik. Dikatakan demikian karena hanya pendidikan yang secara komprehensif memungkinkan perubahan sikap ke arah yang lebih positif, tidak terkecuali sikap merespons konflik dan kekerasan.⁴ Peran pendidikan dalam mewujudkan perdamaian sangat penting. Pendidikan merupakan aset berharga bagi pengembangan sumber daya manusia, agar terwujud *civil society* yang kuat. Dengan peran pendidikan

²Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama : Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran*, (Depok : Katakita, 2009), hlm 1.

³Dany Haryanto, dan G Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011), hlm 113.

⁴Rizal Panggabean dkk, *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*, (Jakarta : PT Pustaka Alvabet, 2015), hlm 1.

yang maksimal, akan terwujud masyarakat dengan kesadaran kritis.⁵

Namun, peran pendidikan perdamaian ini seperti tidak pernah terjadi, padahal lembaga pendidikan juga mempunyai fungsi sosial seperti, membantu memecahkan masalah-masalah sosial, dan mentransmisikan kebudayaan, membentuk manusia dengan jiwa sosial, sebagai alat transformasi kebudayaan.⁶ Sudah benar bahwa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan satu, dengan dijadikan satu lembaga diharapkan mampu berintegrasi dan bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan memaksimalkan fungsi ini, secara tidak langsung lembaga pendidikan sudah berperan aktif dalam usaha perdamaian, atau kita bisa menyebutnya sebagai konsep pendidikan perdamaian, yang salah satu langkah adalah memaksimalkan peran lembaga pendidikan.

Jika kita melihat realitas dunia pendidikan, lembaga pendidikan tidak banyak memainkan peran sosial tersebut. Hal ini ditengarai karena

⁵Paulo Freire menyusun tiga jenis kesadaran masyarakat, *Pertama* kesadaran magis : kesadaran yang tidak mampu menganalisa hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. *Kedua* kesadaran naif : kesadaran sudah mampu menganalisis, namun baru dalam lingkup dirinya sendiri belum sampai kepada faktor diluarnya. *Ketiga* kesadaran kritis : kesadaran yang mampu menganalisa antara satu faktor dengan faktor yang lain, maka seseorang yang sudah sampai pada kesadaran kritis mampu memahami kenapa masyarakat miskin dan terbelakang, apa faktor dan bagaimana mengatasinya. Konsep pendidikan Freire ini digunakan untuk menyadarkan masyarakat agar mampu sampai kepada kesadaran kritis, jadi pendidikan freire tidak hanya sebagai pendidikan belaka namun sampai pada gerakan bagaimana membangun masyarakat dan tatanan sosial yang adil tanpa peindasan. Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, (Jakarta : PT Gramedia, 1984), 15-18.

⁶Hafid, Anwar, dkk, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 51. Hal serupa juga disampaikan oleh S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hlm 16-17.

beberapa sebab. *Pertama* pendidikan dan lembaganya tidak proaktif dengan lingkungan sekitar, karena terlalu banyak hal administrasi yang harus dikerjakan. *Kedua*, tidak ada kebijakan tegas tentang peran dan fungsi lembaga pendidikan terhadap lingkungan dan usaha menjaga kondusifitas lingkungan, sehingga lembaga pendidikan seperti menjadi masyarakat sendiri yang berbeda dengan masyarakat asli. *Ketiga*, tidak ada orientasi kurikulum pembelajaran yang mengarah menuju perwujudan peserta didik yang berperan aktif dalam menjaga perdamaian, guru, dan tenaga kependidikan, sebagai pihak terkait.

Peran pendidikan dalam penanganan konflik dan usaha perdamaian memang belum terlihat. Hal ini juga dilihat dari bagaimana penanganan konflik seringkali ketika konflik sudah pada level nyata dan hanya bersifat reaktif dengan menerjunkan petugas keamanan. Meski konflik sering terjadi, model penanganan di Indonesia selama

ini tampaknya tidak menunjukkan kecenderungan ke arah yang lebih baik. Upaya-upaya penanggulangan konflik dirasa tidak memadai dan seakan tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Solusi atas konflik, cenderung hanya bersifat jangka pendek, dengan menerjunkan aparat keamanan, menangkap provokator maupun pelaku utama di wilayah konflik. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini juga lebih menekankan pada pendekatan struktural formal daripada pendekatan kultural.⁷

Dengan situasi yang demikian, diperlukan *shifting education paradigms*, dari pendidikan yang tidak aktif dalam pembangunan sosial, secara khusus lembaga pendidikan, menjadi lembaga pendidikan yang ikut membangun, mempengaruhi tatanan sosial masyarakat. Dalam pembangunan dan pengembangannya, lembaga pendidikan harus memosisikan diri berada ditengah-tengah masyarakat, sehingga lembaga pendidikan harus menjadi perekat antara dua kutub yang berseberangan. Dengan adanya peran lembaga pendidikan yang seperti ini, diharapkan bisa membangun pendidikan perdamaian yang tidak hanya dalam konsep (*das sein*), namun benar-benar bisa menjadi sebuah hal yang *real*, dan

bisa diterapkan dalam masyarakat (*das sollen*).

PEMBAHASAN

Pendidikan Perdamaian

Pendidikan dengan orientasi perdamaian mempunyai peran penting dalam transformasi kebudayaan damai dalam masyarakat. Menurut Tilaar⁸ Pendidikan bukan sekedar konsumsi tetapi juga merupakan investasi produktif dalam masyarakat. Pedagogik kontemporer melihat pendidikan bukan sekedar transmisi kebudayaan atau mempersiapkan warga negara untuk masa depan, tetapi terutama sebagai proses penyadaran individu sebagai pendukung dan pembaharu kebudayaan. Tidak ada kebudayaan yang statis, terutama dalam dunia terbuka abad 21. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan adalah dua sisi dari sebuah mata uang yang sama. Kebudayaan yang semakin dinamis dewasa ini membutuhkan adanya aktor kebudayaan yang kreatif dan produktif. Hal ini bisa tercapai merupakan hasil dari proses pendidikan yang membebaskan. Disisi lain, kebudayaan yang dinamis akan merangsang perkembangan individu yang kreatif. Lekatnya pendidikan dan kebudayaan menjadi sebuah keuntungan besar bagi pendidikan untuk mengkampanyekan perdamaian.

⁷Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan*, hlm 5.

⁸H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hlm 48.

Galtung⁹ memilah perdamaian menjadi dua jenis tipologi berdasarkan struktur sosial, yakni perdamaian positif dan negatif. *Pertama*, perdamaian negatif merupakan suatu kondisi tidak adanya konflik, tidak terjadi kekerasan, maupun perang akibat dipisahkannya dua pihak yang berkonflik. *Kedua* perdamaian negatif memerlukan kontrol dan kuasa dari pemerintah untuk melaksanakan perdamaian dan aparat keamanan untuk memisahkan pihak yang berkonflik. Dengan adanya damai negatif pihak yang berkonflik tidak akan bertemu dalam satu ruang atau satu daerah yang sama, usaha perdamaian ini bisa dikatakan sebagai sekularisasi yang dipaksakan untuk meminimalisir ketegangan sampai pada tingkat kekerasan. Perdamaian yang dipaksakan dan masih bersifat semu ini, kemudian kiranya yang membuat Galtung menamainya sebagai perdamaian negatif. Klasifikasi perdamaian negatif adalah pesimistis, kuratif, dan perdamaian tidak selalu dengan cara damai.

Perdamaian positif mengacu pada kedewasaan dan suasana damai dimana terdapat keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Damai positif terjadi akibat interaksi sosial masyarakat terjalin dengan baik, senantiasa ada komunikasi dan kemampuan untuk menerima

orang yang berbeda untuk tetap hadir dan dianggap dalam masyarakat. Mewujudkan perdamaian positif memerlukan visi kedepan dan melupakan kenangan konflik lama dan berorientasi membangun masyarakat kembali dalam suasana damai. Integrasi antar komponen masyarakat dan kesadaran akan pentingnya perdamaian menjadi kunci mewujudkan perdamaian positif.

Klasifikasi perdamaian positif adalah integrasi struktural, optimis, preventif, dan perdamaian melalui jalan damai. Dengan perdamaian positif menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya damai, kondisi sosial yang aman guna membangun perekonomian, pemberdayaan, kemajuan tidak akan berkembang tanpa perdamaian. Oleh karenanya, berkaitan dengan perdamaian positif, ada sepuluh nilai-nilai hubungan positif, yakni kehadiran kerjasama, kebebasan dari rasa takut, bebas dari keinginan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tidak adanya eksploitasi, kesetaraan, keadilan, kebebasan bertindak, pluralisme, dinamisme. Pemaknaan perdamaian positif adalah dimulai dari diri sendiri untuk bisa menerima yang berbeda, meminggirkan egoisme demi adanya perdamaian, menerima kebebasan dan

⁹Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development, and Civilization*, (London and New Delhi: Sage Publication, 1996) hlm 67-70. Temesgen Tilahun, "Johan Galtung's Concept of Positive and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia: An Appraisal," *Academic Research Journal* 3, no. 6 (Juni 2015) hlm 252.

hak asasi manusia untuk hidup dan tidak mengeksploitasi. Perdamaian positif diisi dengan perilaku positif guna menciptakan tatanan sosial yang imparisial.¹⁰

Dari klasifikasi Galtung kita bisa melihat bahwa, perdamaian tidak selamanya terjadi akibat harmonisasi (perdamaian positif) masyarakat, namun juga bisa karena pemaksaan penguasa (sebagai perdamaian negatif). Dalam proses transformasi masyarakat menuju budaya damai, dan pendewasaannya, agar menciptakan budaya damai positif, memerlukan pendidikan. Unsur pendidikan, dalam mewujudkan budaya damai, disampaikan UNICEF. Badan PBB yang menangani pendidikan ini, mendefinisikan pendidikan perdamaian adalah proses mempromosikan pengetahuan, keahlian-keahlian, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku yang memungkinkan anak-anak, pemuda dan orang dewasa untuk mencegah

(*to prevent*) konflik dan kekerasan; menyelesaikan (*to resolve*) konflik secara damai; dan menciptakan (*to create*) kondisi yang kondusif untuk perdamaian, baik pada level antar personal, interpersonal, antar kelompok, nasional dan internasional.¹¹ Dari definisi diatas dapat dilihat pendidikan mempunyai peran penting mulai dari pencegahan (*to prevent*), menyelesaikan (*to resolve*), menciptakan (*to create*) kondisi yang kondusif untuk perdamaian, agar sebuah konflik tidak merambat sampai kepada aksi kekerasan.

Karena pendidikan tidak bisa dimaknai hanya sebagai transfer pengetahuan semata. Namun pendidikan sebagai transformasi budaya dan nilai. Pendidikan sebagai transformasi budaya didalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat disebut sebagai kegiatan pewarisan budaya, nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi yang lainnya.¹² Pendidikan dan budaya memainkan

¹⁰Dalam proses rekonsiliasi Galtung menjelaskan tiga proses untuk mencapai perdamaian yakni *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. *Peacekeeping* merupakan usaha intervensi penguasa untuk memisahkan pihak yang berkonflik, dengan menggunakan aparat keamanan, militer guna mencegah pertemuan antar keduanya. Dalam pendekatan ini aparat keamanan bisa menjaga perbatasan, melakukan patroli dan menindak pihak yang melanggar perbatasan atau semacamnya. *Peacemaking* merupakan proses usaha rekonsiliasi melalui pertemuan, komunikasi pada level elit dan pemimpin untuk melakukan mediasi, negosiasi, arbitrase melalui pihak ketiga. *Peacebuilding* merupakan proses akhir yang berlangsung relatif panjang karena didalamnya mencakup beberapa dimensi relasi personal yang berkonflik, kultur dan struktural sosial yang akan dibangun kembali, transformasi nilai, termasuk peningkatan kapasitas lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan aparat keamanan. Johan Galtung, *Peace, war and defense: essays in peace research; Vol. 2*, (Ehlers: Copenhagen, 1976), hlm 282.

¹¹Susan Fountain, *Peace Education in UNICEF*, (New York : UNICEF, 1999), hlm 1.

¹²H.A.R Tilaar, *Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif bagi Pembangunan Masyarakat Industri Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: LIPI, 1991), hlm 21.

peranan penting yang didalamnya disatukan akan transformasi nilai, maka tidak akan lengkap jika pendidikan tanpa kebudayaan demikian halnya sebaliknya. Dalam proses transformasi nilai ini terjadi sebuah proses internalisasi. Internalisasi merupakan proses dialektika individu sebagai bagian dari suatu masyarakat, karena individu tidak diciptakan sebagai suatu benda yang pasif dan lembam (diam), sebaliknya ia adalah sebuah peserta aktif yang mempunyai peran, identitas untuk melakukan eksistensi.¹³

Guna menciptakan perdamaian, tidak bisa dipungkiri memerlukan pendidikan akan orientasi menuju perdamaian positif. Untuk mencapai ini diperlukan pemaknaan pendidikan sebagai objek formal keilmuan untuk mentransfer nilai-nilai dan budaya damai. Dalam objek

formal, materi keilmuan pendidikan harus mampu mengkampanyekan perdamaian terhadap setiap individu untuk menjadi agen perdamaian. Sedangkan dalam objek material lembaga pendidikan tidak boleh hanya berpusat pada anak didik.¹⁴ Lembaga pendidikan harus berani membangun tatanan sosial yang harmonis dan toleran. Sekolah harus imparial, artinya memberi porsi dan perhatian yang persis sama pada segala bidang, jangan sampai bias atau pilih kasih. Kita sudah menyaksikan bagaimana individu pasti dibentuk kebudayaan. Dalam kasus sekolah, proses serupa juga berlangsung.¹⁵ Dengan demikian dari aspek material dan formal pendidikan akan menjadi sebuah gerakan sosial menuju tatanan sosial yang baru yang mampu mengkampanyekan perdamaian, dan mampu mempengaruhi tatanan sosial.

Matriks Perbedaan Perdamaian Positif dan Negatif

No	Keterangan	Damai Positif	Damai Negatif
1	Ciri-Ciri	Damai Jangka Panjang Bukan sekedar peniadaan perang Mempromosikan keadilan, kepercayaan dan empati	Damai sementara Sekedar tidak ada perang Memendam bibit permusuhan dan curiga
2	Penekanan	Kerjasama dan Dialog	Kontrol dan kendali keamanan

¹³Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta : LP3ES, 1991), hlm 22-23.

¹⁴George S. Counts, *Menggugat Pendidikan, Beranikah Sekolah Membangun Tatanan Sosial yang Baru?*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm 355.

¹⁵*Ibid*, 358.

No	Keterangan	Damai Positif	Damai Negatif
3	Strategi	Meningkatkan hubungan antar kelompok (asosiatif)	Memutus hubungan antar kelompok
		Damai mulai dari bawah ke atas (<i>trickle up strategy</i>)	Damai dimulai dari atas ke bawah (<i>trickle down strategy</i>)
4	Interaksi sosial	Tinggi	Rendah
5	Organisasi Sosial	Unit kecil, otonom, orientasi pada keragaman	Unit besar, pemusatan dan orientasi pada penyeragaman
6	Orientasi kebijakan	Mengelola sebab-sebab kekerasan : sikap dan struktur	Menghapus kekerasan yang sifatnya langsung
7	Implikasi	Menjamin damai jangka panjang	Mengarah pada kekerasan yang lebih besar dalam jangka panjang.

Sumber : diolah penulis¹⁶

Pendidikan mempunyai andil dalam menyadarkan masyarakat menuju budaya damai positif. Dalam usaha membangun kesadaran masyarakat terbagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama* kesadaran magis : kesadaran yang tidak mampu menganalisa hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Sehingga kesadaran pada tingkat ini, masyarakat menjadi terbelakang, tidak mampu berkembang, mereka hanya cenderung menerima apa adanya keadaan, menerima segala hal yang dianggap baik dari tradisi terdahulu, termasuk pewarisan perasaan benci kepada kelompok tertentu. *Kedua* kesadaran naif : kesadaran sudah mampu menganalisis, namun baru dalam lingkup dirinya sendiri belum

sampai kepada faktor diluarnya. Kesadaran ini masih bersifat individu, sehingga tidak mampu mempengaruhi keadaan sosial. Maka dalam tingkat ini individu cenderung egois tidak memperdulikan keadaan sekelilingnya. Sehingga masyarakat dalam tingkat ini masih rawan akan konflik. *Ketiga* kesadaran kritis : kesadaran yang mampu menganalisa antara satu faktor dengan faktor yang lain, maka seseorang yang sudah sampai pada kesadaran kritis akan mampu memahami kenapa masyarakat miskin dan terbelakang, apa faktor dan bagaimana mengatasinya.¹⁷ Kesadaran kritis ini pada akhirnya yang akan mendekatkan masyarakat akan pentingnya perdamaian dan mewujudkan perdamaian positif.

¹⁶Terinspirasi dari workshop, Penyusuna Kurikulum Manajemen Konflik Untuk Mahasiswa. Pada 26 Oktober 2018. Dengan pemateri, Anas Ajudin.

¹⁷Zaenal Abidin dan Muhammad Taufik Ismail, *Perbandingan Tujuan Pendidikan Untuk Membentuk Manusia Ideal Menurut Paulo Feire dan Muhammad Iqbal*, SUHUF, Vol. 30, Mei 2018, hlm 16.

Menurut Page, pendidikan perdamaian adalah suatu usaha untuk menumbuhkan prinsip dan komitmen, serta usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilai, sikap, yang dapat mewujudkan perdamaian, sehingga mereka layak disebut sebagai agen-agen perdamaian.¹⁸ Jadi menurut Page pendidikan perdamaian meliputi transfer *knowledge* untuk menumbuhkan prinsip dan komitmen akan pentingnya perdamaian, tidak hanyasampaidisitu, pesertadidik harus mampu menjadi agen perdamaian. Jadi pendidikan perdamaian menurut Page adalah usaha transfer, kognitif untuk menyampaikan pesan dan pengetahuan tentang pentingnya perdamaian. Aspek kognitif ini merupakan landasan dasar menuju tingkat selanjutnya yakni afektif. Afektif merupakan perubahan sikap mampu menjaga perdamaian, mengkampanyekan sampai kepada menyikapi sebuah konflik. Aspek terakhir, psikomotor bisa dimaknai ia sudah menjadi agen perdamaian yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya yang dahulu bersitegang mampu melakukan mediasi dan mencari jalan tengah untuk *win-win solution*.

Peranan guru sebagai transformasi sosial menuju budaya damai.

Sebuah lembaga pendidikan, harus mampu menciptakan agen-agen perdamaian. Dalam hal ini, guru memainkan peran yang sentral, karena ia merupakan *role model*, penyampai materi dan orang yang mampu mengevaluasi peserta didik, agar mampu mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan selalu bersifat antisipatif, yaitu mempersiapkan peserta didik, agar mampu melaksanakan peran dan tugas hidup di masa depan.¹⁹ Dengan memperhatikan zaman yang selalu berubah, tantangan masa depan, dan peran guru sebagai pencetak agen perdamaian, diperlukan interpretasi dan reinterpretasi tugas dan visi guru.

Dalam metode pembelajaran peran guru sangatlah penting. Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang amat strategis. Karena sedemikian pentingnya, hingga di antara pakar pendidikan ada yang berpendapat : “Andaikata tidak ada kurikulum secara tertulis, tidak ada ruang kelas dan prasarana belajar mengajar lainnya, namun masih ada guru, maka pendidikan masih tetap berjalan.”²⁰ Guru dalam komponen

¹⁸James S. Page, *Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical Foundations* (USA: Information Age Publisher, 2008), hlm 189.

¹⁹Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam ; Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 158.

²⁰Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 121.

pendidikan bisa memainkan peran penting tidak hanya dalam lingkup dunia pendidikan. Namun juga sebagai penggerak perubahan sosial (*agent of social change*) ke arah yang lebih baik, serta membangun peradaban secara seimbang yakni fisik, intelektual, sosial, seni, moral dan spiritual.

Guru sebagai profesi yang memainkan peran begitu penting ini, tidak ayal mampu mempengaruhi pola pandang masyarakat sampai pada tingkah laku, etika masyarakat. Karena guru memainkan peran pendidik yang mentransformasikan pengetahuan, nilai, etika sejak dini sampai kepada seseorang remaja sampai dewasa. Peranan guru untuk menyiapkan regenerasi individu yang siap terjun ke masyarakat sangat penting. Jika guru mampu menyampaikan pengetahuan, nilai yang baik kepada siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor dengan baik, output pendidikan yang dihasilkan akan membentuk individu yang baik yang beretika, mampu bergaul, bersosialisasi, dan bisa berperan aktif dalam memajukan masyarakat. Dari sini terlihat, peran guru yang begitu sentral dalam pembangunan individu. Dalam aspek pendidikan perdamaian akan ditekankan dalam dalam ketiga ranah ini, kognitif, afektif, psikomotor.

Sehubungan orientasi peran guru, dalam pembangunan masyarakat dan pendidikan perdamaian begitu

penting, maka seorang guru harus memiliki visi dan misi sesuai dengan Al-Qur'an. Yakni *Ulul Albab*, *al-Ulama*, *al-Muzakki*, *ahl al-Dzikir* dan *Rasikhuna fi al-'ilm*, yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Visi dan misi ini secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, *Ulul Albab* berdasarkan Al-Qur'an surat Ali 'imran, ayat 190-191 dapat diketahui bahwa visi guru adalah menjadi orang yang memiliki keseimbangan antara daya pikir, daya nalar dengan daya zikir dan spiritual.²¹ Dengan adanya guru yang mempunyai visi ini akan dikembangkan menuju daya untuk melaksanakan *amar ma'ruf* (perintah mengerjakan kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran). Sehingga visi seorang guru adalah mengembangkan dari aspek spiritual berupa pembangunan mental sampai kepada aspek material, secara langsung untuk mengembangkan keterampilan, baik berkaitan dengan skill, maupun kemampuan sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan kompetensi sosial yang disyaratkan sebagai guru profesional. Sehingga dapat dikatakan visi seorang guru adalah membangun dunia menuju tatanan yang lebih baik, lebih damai dan lebih sejahtera. Tanpa peranan pendidikan dan guru didalamnya, tidak akan terwujud perdamaian yang sejati.

²¹*Ibid*, hlm 124

Kedua, *al-Ulama* dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 27-28 dapat diketahui, bahwa sebagai ulama ia mendalami ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian terhadap alam.²² Guru dengan visi sebagai *al-Ulama* mempunyai arti bahwa seorang guru harus mempunyai semangat untuk selalu berkembang, melalui penelitian dan rasa keingintahuannya terhadap bidang yang ia tekuni. Dari semangat untuk selalu berkembang dan belajar ini, harus sampai kepada tingkat seorang ilmuan yang senantiasa takut kepada Allah. Dengan adanya sikap ini seorang guru akan senantiasa berkembang dan selalu bertakwa kepada Allah, dengan hal ini akan tetap sesuai dengan visi pertama dari seorang guru sebagai seorang *Ulul Albab*.

Dalam hal ini, sebuah lembaga pendidikan harus mempunyai seorang guru atau bidang tersendiri yang bertugas dalam bidang perdamaian. Sebuah lembaga, biasanya mempunyai humas (hubungan masyarakat), dalam lembaga pendidikan, humas tidak hanya bertugas bagaimana menjalin hubungan baik dengan masyarakat, namun juga sebagai bidang yang memperhatikan dan menganalisis dengan pisau analisis sosial, sehingga dengan pengamatan dan kerja analisa yang dilakukan, lembaga pendidikan

mampu memberikan masukan dan saran bagi sebuah masyarakat yang sedang mengalami problem, atau adanya bersitegang antar kelompok. Dengan adanya lembaga yang bertugas di bidang ini, lembaga pendidikan akan mampu mempengaruhi situasi sosial masyarakat, sehingga sebuah lembaga pendidikan akan lebih terpendang dan bisa berperan aktif dalam mewujudkan *civil society*.

Ketiga *al-Muzakki*, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 129, surat Ali 'imran ayat 164. Bahwa visi seorang guru adalah orang yang memiliki mental dan karakter yang mulia. Hal ini sesuai dengan visi dan misi guru profesional yang memiliki kepribadian yang baik,²³ mengembangkannya agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Sehingga seorang guru profesional mampu menjadi contoh yang baik, baik dalam aspek sosial kemasyarakatan dan spiritualnya. Seorang guru tidak boleh menjadi pribadi yang egois dan asosial. Ia merupakan manusia yang menentukan kualitas manusia masa depan. Guru diwajibkan diwajibkan berperan aktif dalam masyarakat, pembangunan sosial, dan menjadi agen perdamaian, karena ia merupakan produk intelektual. Seorang intelektual harus tahu dan bertanggung jawab atas apa yang ia katakan dan lakukan.²⁴

²²*Ibid*, hlm 125

²³*Ibid*, hlm 126

²⁴Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994, diterjemahkan Amien Rais), hlm 243.

Keempat, *ahl al-Dzikh* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Al-Ambiya ayat 7. Bahwa visi seorang guru adalah menjadi orang yang diakui kepakarannya, menguasai ilmu pengetahuan sehingga dan memiliki *expert judgment*.²⁵ Pengakuan untuk menjadi otoritas untuk memberikan pembenaran atau pengakuan atas berbagai problematika maupun temuan ilmiah. Sehingga seorang guru harus mempunyai bidang studi yang benar-benar ia tekuni, dengan melakukan studi yang fokus dan tekun, akan sangat membantu guru untuk lebih baik dalam mengembangkan keilmuan yang ia miliki.

Kelima, *Rasikhuna fi al-'ilm* dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 162 merupakan menjadi orang yang memiliki kemampuan bukan hanya pada tahap membaca data atau melihat fakta secara kasat mata, namun mampu memberikan interpretasi atas suatu hal yang terjadi. Sehingga seorang guru tidak akan menyampaikan suatu hal secara tekstual semata, namun bisa memberikan makna atas suatu hal tersebut. Dengan adanya pemberian makna ini, akan timbul semangat untuk belajar karena senantiasa diberikan suatu pandangan yang baru atas pemaknaan suatu hal.

Lembaga Pendidikan Sebagai Gerakan Sosial Perdamaian

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan bagaimana mengkonsep

pendidikan perdamaian dengan pendekatan teori gerakan sosial. Gerakan sosial memang identik dengan pengerahan massa, sedangkan lembaga pendidikan agak sedikit berbeda, meskipun sama-sama terdiri dari kumpulan individu. Gerakan sosial cenderung menggelorakan suatu tuntutan tertentu, atau aksi. Namun lembaga pendidikan tidak mengenal hal seperti itu. Penulis menilai, penting untuk mengkonsep sebuah pendidikan perdamaian dengan pendekatan gerakan sosial, hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan. *Pertama*, dengan menggunakan teori ini, akan lebih mendekati konsep penerapan, dari pada hanya konsep akademik. Karena dengan pendekatan ini, akan tersusun bagaimana sebuah aksi pengkampanyean perdamaian dilakukan. *Kedua*, lembaga pendidikan harus menggeser paradigma, dari hanya sebagai lembaga pendidik yang memproduksi intelektual, tapi juga mampu berperan aktif dalam masyarakat, baik dalam usaha perdamaian maupun pengembangan masyarakat.

Ketiga, pendidikan harus senantiasa antisipatif dan mengikuti perkembangan zaman, karena zaman senantiasa berubah, tidak hanya kurikulum saja yang harus berubah dan berkembang, tapi juga lembaga sebagai induk juga demikian. *Keempat*, dengan adanya konsep awal tentang lembaga pendidikan sebagai aktor perdamaian ini, diharap

²⁵Abuddin Nata, *Ibid*.

mampu dikembangkan menjadi konsep yang lebih jelas dan matang. Jika konsep ini berhasil diterapkan, kita akan melihat peran guru, tenaga kependidikan akan lebih menyatu dengan masyarakat, memainkan peran, dan akhirnya sikap sosial murid juga akan terasah. Karena mereka juga dididik dengan memahami masyarakat dengan menggunakan analisis sosial. *kelima*, melihat pluralitas masyarakat yang tinggi, Indonesia yang terdiri dari berpulau-pulau, maka potensi konflik akan selalu ada, disini peran lembaga pendidikan harus memerankan fungsi sebagai lembaga perdamaian. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, polarisasi akibat Pemilu begitu terlihat dalam masyarakat. Dari sini harus ada yang memainkan peran preventif dalam mendidik, dan aksi ke masyarakat agar polarisasi tidak berkepanjangan.

Penulis memahami, bahwa lembaga pendidikan sudah cukup tugas selama ini, namun dengan anggaran 20% dari APBN saya kira kita bisa memaksimalkan anggaran yang begitu besar ini. Konsep ini tentunya tidak

sekali jadi, memerlukan proses koreksi, *cek and ricek*, percobaan-percobaan. Namun hal itu tidak menjadi sebuah masalah besar, ia merupakan sebuah proses yang harus dihadapi, agar jika benar ini menjadi sebuah kebijakan atau paling tidak diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan, ia benar-benar bisa berdampak pada masyarakat. Kesiapan SDM menjadi kunci utama dalam konsep ini, karena guru atau dosen lebih identik dengan mengajar, bukan sebagai analis sosial dan agen perdamaian. Namun jika problem ini bisa dilewati, ia akan menjadi *role model* bagi dunia.

Jika kita berbicara tentang gerakan sosial, ada tiga kunci jika kita ingin memahami gerakan sosial.²⁶ Pertama, *political opportunity* (kesempatan politik), kedua *framing* (pembingkaiian), dan ketiga, *resources mobilization* (pengerahan sumberdaya).

Political Opportunity

Dalam kesempatan politik,²⁷ setelah pasca reformasi, Indonesia menatap era baru dan perubahan yang

²⁶Studi tentang gerakan sosial dapat dibagi menjadi dua pendekatan yang saling bertentangan. Pendekatan pertama adalah teori yang cenderung melihat gerakan sosial sebagai suatu masalah atau disebut sebagai gejala penyakit masalah kemasyarakatan. Pendekatan kedua adalah teori-teori ilmu sosial yang justru melihat gerakan sosial sebagai fenomena positif, atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap fungsionalisme, dan dikenal dengan teori konflik. Lihat. Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 39-41.

²⁷Kesempatan politik untuk menciptakan gerakan sosial, dapat dipilah menjadi dua, yakni tertutup dan terbuka. Pola tertutup menciptakan hambatan bagi gerakan sosial; sedang pola terbuka memberi kesempatan bagi kemunculan dan perkembangan suatu gerakan sosial sebagai bagian dari relasi politik dan antara kelompok kepentingan. Pola tertutup akan menghambat adanya gerakan sosial, sedangkan semakin terbuka kesempatan politik, semakin

signifikan. Dunia pendidikan juga mengalami perubahan. Pendidikan menjadi lebih bebas dan terbuka untuk mengembangkan dan menyampaikan materi. Kebijakan dalam era ini, ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan. Kebijakan ini juga dirasa dalam dunia pendidikan, pendidikan menjadi semakin dinamis setelah adanya desentralisasi, dengan kebijakan ini, setiap wilayah bisa mengembangkan sumber daya dan membangun ciri khas masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.

Dalam era ini, Zamroni menyebutnya sebagai demokratisasi pendidikan. Pada intinya, kesetaraan antar sekolah negeri dan swasta, mengembalikan pendidikan ke tangan kepala sekolah dan mengembalikan pembelajaran ke tangan guru.²⁸ Era keterbukaan ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan peran sosial kepada masyarakat, tidak hanya menjadi lembaga yang mencetak intelektual, namun lembaganya juga membangun tatanan sosial. Lembaga Perguruan Tinggi memang sudah memainkan peran ini, melalui kebijakan Wakil Rektor III, atau LP2M, yang meskipun

besar kemungkinan ada dan berkembangnya gerakan sosial. Lihat. Ihsan Ali-Fauzi dan Syaiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Atas Perda Syariah* (Jakarta: Nalar, 2009), hlm. 7.

²⁸Zamroni, *Kultur Sekolah*, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2016), hlm v.

²⁹Daniel Bar-Ta, Yigal Rosen, *Peace Education in Societies Involved in Intractable Conflicts: Direct and Indirect Model*, (Amerika: Jurnal American Educational Research Association, 2009) hlm 559.

belum begitu banyak dampak yang terlihat. Sekolah sebagai penyumbang mahasiswa di PT, juga harus mencoba hal ini, melalui pemanfaatan Humas dan pembentukan lembaga tersendiri.

Ada dua pendekatan untuk pendidikan perdamaian: pendekatan sempit yang berfokus pada sosialisasi untuk perdamaian yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pendekatan luas yang berkaitan dengan sosialisasi dan persuasi masyarakat. anggota untuk mendukung proses dan fungsi perdamaian di dalamnya. Artikel ini memfokuskan pada jenis kedua dari pendidikan perdamaian, dengan fokus pada pembangunan *repertoar* (daftar rencana) baru untuk siswa di sekolah. Mewujudkan kultur perdamaian membutuhkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Sekolah dapat memainkan peran penting dalam membawa perubahan seperti itu, tetapi sekolah hanya merupakan satu agen, dan perubahan sosial yang besar membutuhkan partisipasi lembaga-lembaga politik, sosial, dan budaya, komunikasi massa, kepemimpinan, dan elit. Garis pendidikan perdamaian ini dapat terjadi melalui berbagai metode dan teknik dengan perencanaan yang matang serta melalui tindakan spontan.²⁹

Dalam pelaksanaannya, kita bisa mengkonsep kerangka kerja yang saling berkaitan, untuk menguatkan ketahanan sosial. Pertama, *coping capacities*, yaitu kemampuan aktor sosial untuk mengatasi dan menyelesaikan segala macam masalah. Dalam tahap ini, ketika masyarakat mengindikasikan adanya permasalahan, lembaga pendidikan bisa merespon dan berusaha menyelesaikan. Kedua, *adaptive capacities*, yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri dengan tantangan masa depan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, *transformative capacities*, yaitu kemampuan untuk merangkai lembaga yang mendorong kesejahteraan individu dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan terhadap krisis di masa depan. Dengan cara ini, membangun ketahanan sosial, terutama dalam hal kepedulian terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan, dapat dinyatakan sebagai isu politis, tidak hanya teknis.³⁰ Dalam tahap ini, lembaga pendidikan bertugas sebagai preventif, penguatan masyarakat dan tindakan pertama

ketika terjadi sebuah pergolakan dalam masyarakat.

Framing

Proses *framing*,³¹ merupakan pembingkai, pembangunan persepsi, menggunakan analisis sosial. Dalam analisisnya terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah diagnosis *framing*, yaitu yang dikonstruksikan dalam sebuah gerakan sosial guna memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang sifatnya problematik. Kondisi mengenai apa atau siapa yang disalahkan, sehingga membutuhkan adanya suatu perubahan. Dalam level ini, aktor-aktor gerakan sosial mendefinisikan permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi isu utama yang membuat mereka menginginkan adanya perubahan dan kenapa konflik bisa terjadi. Kedua, prognosis *framing*,³² yaitu artikulasi solusi yang ditawarkan atas persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dalam aktivitas prognosis *framing* ini, gerakan sosial juga melakukan berbagai penyangkalan atau menjamin kemanjuran dari solusi-

³⁰Nur Iman Subono, *Dari Adat ke Politik: Transformasi Gerakan Sosial Di Amerika*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2017), hlm 30. Nurul Hidayah, Mohtar Mas' oed, dan Budi Irawanto, *Ketahanan Sosial Pada Pemuda Penyelenggara Festival Film Dokumenter 2015*, (Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 23), hlm 37.

³¹*Ibid*, hlm 38. Lihat lebih lanjut, dalam. Johan Galtung dan Charles Webel, *Handbook Studi Perdamaian dan Konflik*, terjemah : Imam Baehaqie (Bandung : Nusa Media, 2018), hlm 23-25.

³²Mohammed Abu-Nimer, *Nirkekerasan dan Bina-Damai Dalam Islam : Teori dan Praktik*, (Jakarta : Alvabet, 2010), hlm 15.

solusi yang ditawarkan. Terakhir adalah *motivational framing*, yaitu elaborasi panggilan untuk bergerak atau dasar untuk terlibat dalam usaha memperbaiki keadaan melalui tindakan kolektif.

Resources Mobilization

Resources sendiri sebenarnya memiliki makna yang begitu luas. *Resources* dapat terdiri dari kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan simpatisan, loyalitas grup. Ia juga bisa terdiri dari kepemilikan ruang atau gedung, pengetahuan (*stock of knowledge*), dan *skill* (keahlian) yang dimiliki oleh aktor, termasuk di dalamnya ideologi dan nilai gerakan.³³

Proses *resources* merupakan pemanfaatan semua sumberdaya diatas guna mempengaruhi situasi sosial. dalam konteks usaha perdamaian, *resources* merupakan usaha memisahkan dua pihak yang berseteru dengan menggunakan jaringan yang dimiliki, untuk mewujudkan perdamaian negatif. *Resources* juga digunakan dalam usaha mewujudkan perdamaian positif, dengan cara melakukan lobi-lobi terhadap kedua pihak. Dalam usaha pembangunan masyarakat kembali, *resources* juga sangat diperlukan guna merubah struktur, kebijakan dan penangkapan provokator.

Sehingga dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang berperan dalam pembangunan *civil society* dan usaha perdamaian, bisa menggunakan gerakan sosial yang dimodifikasi sedemikian rupa. Hal ini juga mempertegas, lembaga pendidikan bisa menjadi agen perdamaian, jika ia benar-benar serius dalam mewujudkan fungsi sosialnya.

Belajar Dari Sekolah Sukma Bangsa

Indonesia sudah mempunyai percontohan, tentang bagaimana membangun sekolah yang humanis, atau pendidikan perdamaian. Contoh itu di tunjukkan oleh Sekolah Sukma Bangsa (SSB). Berada di Aceh, sekolah ini pada awalnya dibangun untuk mengcover anak-anak yang terlantar akibat tsunami Aceh. Karena latar belakang ini, SSB pada awalnya sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Namun karena berbagai langkah progresif untuk pengembangan sekolah, baik dalam pembangunan kultur, pembangunan SDM dan berbagai hal teknis lainnya, sampai hari ini, SSB telah menjadi sekolah yang humanis dan maju di Aceh.

Nama “Sekolah Sukma” pada awalnya dimaksudkan sebagai sekolah unggulan kemanusiaan.³⁴ Barangkali, dari asal nama ini, timbullah semangat

³³Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS : Suara dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm 20.

³⁴Ahmad Baedowi, *Nilai-Nilai Dasar Sukma Bangsa*, (Sukma: Jurnal Pendidikan, Volume 1 Issue 1, Jan-Jun 201), hlm 1.

untuk mengembangkan sekolah yang humanis, dengan berprinsip pada pendidikan perdamaian, ditengah situasi sosial yang rawan akan konflik. Kita mengetahui bersama, Aceh merupakan daerah konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Pusat. Dari dua latar ini, adanya konflik dan bencana, melahirkan sebuah konsep baru tentang pendidikan perdamaian.

Upaya pembangunan SSB, ditempuh dalam beberapa tahap dan diikuti dengan berbagai kebijakan yang jelas dan terukur. Hal pertama yang dilakukan SSB adalah membangun *teacher supremacy*, yakni pembangunan tenaga pendidik yang berkualitas. Nilai yang dikembangkan dalam setiap guru, ditekankan adanya kombinasi nilai antara kultur pesantren dan pendidikan modern. Dari nilai dasar ini, para guru dituntut untuk selalu inovatif dalam memberikan pembelajaran. Salah satu contoh pembelajaran inovatif adalah adanya kebijakan *moving class*. Kebijakan ini, menuntut guru dan murid mempunyai pemahaman bahwa, kelas pembelajaran, bukan hanya berada dalam ruangan ini, namun terbentang luas di alam raya. Dari kebijakan ini, para guru akan mencoba metode dan pendekatan baru dalam penyampaian materi, demikian halnya murid tidak akan cepat merasa bosan. Kebijakan ini, juga diimbangi dengan kebijakan yang jelas, yang

dituangkan dalam *blueprint* dan statuta sekolah. Pengembangan SSB dalam membangun tenaga pendidik yang berkualitas, diimbangi dengan proses pertukaran dan studi banding dengan sekolah unggulan di dalam negeri, sampai kepada luar negeri. Program ini terus berlanjut sampai hari ini, dan menghasilkan perkembangan yang pesat dalam usaha inovatif guru dan kebijakan sekolah.

Pada intinya, SSB melaksanakan pengembangan sekolah dengan beberapa tahap. Pertama pembangunan SDM, kedua kebijakan terarah, terukur dan jelas, meliputi kebijakan RAPBS, penjabaran dan teknis yang jelas mengenai berbagai hal yang harus dilaksanakan dalam proses pendidikan maupun kependidikan. Setelah SSB menjadi sekolah unggulan, mereka mengembangkannya menjadi sekolah dengan berbasis kepada perdamaian. Hal ini, dapat dilihat dalam buku Manajemen Konflik Berbasis Sekolah: Dari Sekolah Sukma Bangsa Untuk Indonesia. Dalam buku ini, dijelaskan tentang bagaimana mengelola konflik, terutama dalam lingkungan sekolah, bagaimana mendidik tanpa kekerasan, hukuman tanpa kekerasan, teknis pemetaan konflik di sekolah, pengelolaan konflik dan perdamaian. Serta berbagai hal teknis lainnya dijelaskan dalam buku ini. Namun, SSB sepertinya belum

mengembangkan konsep pendidikan perdamaian dengan diintegrasikan dengan lingkungan sekitar. Namun pada dasarnya, SSB secara tidak langsung telah melaksanakan pendidikan perdamaian dengan pendekatan *indirect models*. Pendekatan ini menasar pada sosialisasi berkala, guna mencegah konflik terjadi. Selain hal ini, lembaga pendidikan juga menyiapkan tenaga pendidik dan pemberian materi tentang pendidikan perdamaian kepada murid-muridnya. Pendekatan pendidikan perdamaian secara tidak langsung ini, bisa diadopsi untuk pengembangan konsep pendidikan di wilayah lain, yang tidak serawan Aceh.

PENUTUP

Perdamaian merupakan sarana transformasi etika pribadi dan kolektif dan aspirasi untuk meniadakan kekerasan dan kehancuran. Dalam proses transisi ini, pendidikan mempunyai peran besar agar nilai-nilai damai tersampaikan secara penuh. Sehingga, peran guru atau dosen sebagai fasilitator, sekaligus pengubah sikap, untuk mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat sangat penting. Disamping peran tenaga pendidik, lembaga pendidikan juga

mempunyai tugas sebagai kontrol sosial. Sebuah lembaga pendidikan, bisa menjadi lembaga pendidikan, sekaligus lembaga perdamaian dan pengembangan masyarakat. Dalam peran barunya ini, kita bisa menggunakan pendekatan. Pertama, *political opportunity* (kesempatan politik) yakni lembaga pendidikan memanfaatkan kebebasan yang diberikan dalam hal usaha perannya di masyarakat dan sebagai lembaga perdamaian dengan pendekatan preventif. Kedua *framing* (pembingkaiian) merupakan usaha menganalisis berbagai permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat dan bagaimana jalan keluarnya. Ketiga, *resources mobilization* (pengerahan sumberdaya), merupakan pemanfaatan berbagai sumberdaya yang dimiliki baik fisik maupun non fisik dalam usaha pengembangan masyarakat, dan rekonsiliasi. Usaha perdamaian tidak bisa dilakukan oleh satu, dua orang atau lembaga. Perdamaian memerlukan peran dari semua pihak agar menyadari pentingnya perdamaian. Mewujudkan budaya damai memerlukan transformasi personal dan kolektif yang aktif dan terus menerus, disinilah dibutuhkan pendidikan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, Mohammed. 2010. *Nirkekerasan dan Bina-Damai Dalam Islam : Teori dan Praktik*. Jakarta: Alvabet.
- Achmadi. 2010. *Ideologi Pendidikan Islam ; Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baedowi, Ahmad. 2017. "Nilai-Nilai Dasar Sukma Bangsa." *Sukma* 1.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Counts, George S. 2015. *Menggugat Pendidikan, Beranikah Sekolah Membangun Tatanan Sosial yang Baru?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daniel Bar-Ta, Yigal Rosen. 2009. "Peace Education in Societies Involved in Intractable Conflicts: Direct and Indirect Model." *Jurnal American Educational Research Association* 559.
- Dany Haryanto, G Edwi Nugroho. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Fakih, Mansour. 2010. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fountain, Susan. 1999. *Peace Education in UNICEF*. New York: UNICEF.
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Galtung. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development, and Civilization*. London : Sage Publication.
- _____. 1976. "Peace, war and defense: essays in peace research." *Ejlers* 282.
- _____. dan Charles Webel. 2018. *Handbook Studi Perdamaian dan Konflik*. Bandung: Nusa Media.
- Ghazali, Abdul Muqstith. 2009. *Argumen Pluralisme Agama : Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran*. Depok: Katakita.
- Hafid, Anwar. 2014. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ihsan Ali-Fauzi dan Syaiful Mujani. 2009. *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Atas Perda Syariah*. Jakarta: Nalar.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS : Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Nasution, S. 2015. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. 2016. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurul Hidayah, Mohtar Mas'ood, dan Budi Irawanto. 2015. "Ketahanan Sosial Pada Pemuda Penyelenggara Festival Film Dokumenter." *Jurnal Ketahanan Nasional* 37.
- Page, James S. 2008. *Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical Foundations*. USA: Information Age Publisher.
- Rizal Panggabean. 2015. *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Subono, Nur Iman. 2017. *Dari Adat ke Politik: Transformasi Gerakan Sosial Di Amerika*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Syariati, Ali. 1994. *Tugas Cendekiawan Muslim*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, H.A.R. 1991. *Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif bagi Pembangunan Masyarakat Industri Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: LIPI.
- _____. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tilahun, Temesgen. 2015. "Johan Galtung Concept of Positive and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia: An Appraisal." *Academic Research Journal* 252.
- Wahab, Abdul Jamil. 2014. *Manajemen Konflik Keagamaan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Zaenal Abidin dan Muhammad Taufik Ismail. 2018. "Perbandingan Tujuan Pendidikan Untuk Membentuk Manusia Ideal Menurut Paulo Feire dan Muhammad Iqbal." *SUHUF* 16.
- Zamroni. 2016. *Kultur Sekolah*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.